

## Implementasi Administrasi Publik Di Negara Islam: Negara Iran

Galuh Alfiana Hastuti<sup>1</sup>, Muhammad Fauziyan<sup>2</sup>, Trisnandi<sup>3</sup>, Argi Ardiyansah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Syekh – Yusuf Tangerang

### ABSTRAK

Tujuan penulisan Artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Administrasi Publik Islam yang diterapkan di Iran. Dimana Iran berupaya menggabungkan prinsip – prinsip demokrasi modern dengan ajaran Islam Syiah, menjadikan konsep seperti keadilan (al – adl), amanah, musyawarah (shura), dan akuntabilitas (hisbah) sebagai fondasi utama dalam kebijakan, struktur kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, implementasi ini menghadapi berbagai tantangan signifikan. Dualisme antara birokrasi formal dan pengawasan keagamaan seringkali memicu inefisiensi dan birokrasi berlapis. Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi administrasi publik di Iran adalah proses dinamis yang merepresentasikan perjuangan berkelanjutan antara idealisme teoretis Islam dan realitas praktis birokrasi modern, memberikan wawasan berharga tentang tata kelola di negara-negara dengan identitas keagamaan yang kuat.

### ABSTRACT

*The purpose of writing this article is to find out how the implementation of Islamic Public Administration is applied in Iran. Where Iran seeks to combine the principles of modern democracy with the teachings of Shia Islam, making concepts such as justice (al – adl), trust, deliberation (shura), and accountability (hisbah) the main foundations in policy, institutional structure, and governance. However, this implementation faces significant challenges. The dualism between formal bureaucracy and religious supervision often triggers inefficiency and layered bureaucracy. This article concludes that the implementation of public administration in Iran is a dynamic process that represents an ongoing struggle between the theoretical idealism of Islam and the practical reality of modern bureaucracy, providing valuable insights into governance in countries with strong religious identities.*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 02, 2025

Revised June 19, 2025

Accepted June 21, 2025

Available online June 27, 2025

#### Kata Kunci:

Administrasi, agama, birokrasi.

#### Keywords:

Administration, religion, bureaucracy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

## 1. PENDAHULUAN

Karena memang Administrasi memiliki peran yang sangat krusial, juga berbeda akibat dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan ideologi. Sebuah negara pastinya memiliki cara pengelolaan administrasi yang berbeda – beda pula, yang memang di negara Islam sendiri bahkan menggunakan administrasi yang berbeda menganut system keagamaan yang dipercayai. Di antara berbagai model yang ada, negara – negara dengan identitas keagamaan yang kuat, khususnya negara Islam, menawarkan cara unik untuk memahami bagaimana prinsip – prinsip keagamaan berinteraksi dengan praktik tata kelola pemerintahan. Republik Islam Iran, sebagai salah satu contoh paling menonjol dari negara Islam modern. Memang Iran menjadi salah satu bentuk negara yang modern tetapi tidak meninggalkan prinsip – prinsip keagamaan di dalamnya, karena mereka percaya bahwa negara dan agama. Iran telah berusaha untuk mengintegrasikan prinsip – prinsip Syariah Islam ke dalam semua aspek kehidupan nasional, termasuk sistem administrasi. Ini menciptakan struktur unik di mana lembaga – lembaga modern secara eksplisit terhubung dengan perumusan dan implementasi implementasi politik, di samping struktur agama tradisional dan ideologi agama.

Iran memadukan antara prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Islam dalam membentuk sistem administrasi publik. Prinsip – prinsip Islam seperti keadilan (al – adl), amanah (tanggung jawab), musyawarah (shura), dan akuntabilitas (hisbah) menjadi bagian integral dalam kebijakan publik, struktur kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan di Iran.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut implementasi administrasi di Negara Islam Iran. Ini menganalisis cara – cara di mana prinsip -prinsip Islam,

\*Corresponding author

E-mail addresses: [galuhalfh21@gmail.com](mailto:galuhalfh21@gmail.com), [nandi.cul02@gmail.com](mailto:nandi.cul02@gmail.com), [fauzianjian236@gmail.com](mailto:fauzianjian236@gmail.com), [argi.ardiyansah123@gmail.com](mailto:argi.ardiyansah123@gmail.com)

khususnya yang berkaitan dengan keadilan, akuntabilitas dan layanan, diartikulasikan dan diimplementasikan dalam struktur birokrasi, proses keputusan, dan interaksi antara pemerintah Iran dan warga negara. Dengan memeriksa tantangan dan keberhasilan dalam sistem ini, kami berharap dapat menyampaikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika administratif dalam konteks negara Islam kontemporer.

## 2. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode Studi Literatur, dimana pendekatan ini melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber pustaka relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel berita, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan administrasi publik di Iran dan negara-negara Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, tantangan, serta keberhasilan dalam implementasi administrasi publik di Republik Islam Iran.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial dimana di dalam kehidupan bersama memang manusia sendiri pastinya membutuhkan orang lain dan saling bergantung, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang memiliki privasi yang tidak bisa dirusak ataupun diganggu oleh orang lain, dan peran negara ini sebagai tiang yang memberikan batasan – batasan mengenai hak per seorangan. Agama dengan Negara sendiri memiliki kaitan, dimana dengan adanya pondasi agama menjadikan suatu negara dituntun ke arah yang maju dan benar secara spiritual, dan tentunya Agama juga memerlukan suatu negara, demi perkembangan agama itu sendiri.

Sistem politik yang diberlakukan di Iran berasaskan konstitusi yang dinamakan "Qanun-e Asasi" (Undang-undang Dasar). Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar – besaran sejak berakhirnya kekuasaan Syah. Dimana bentuk negara ini semulanya monarki-absolut di mana Syah berkuasa, lalu berubah menjadi sebuah republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam mazhab Syi'ah. Perubahan konstitusional dan institusional yang secara substantif dilakukan melalui pemilihan. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui 98,2% masyarakat Iran melalui referendum yang diadakan pada 1 April 1979 dan Undang undang Dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui 99,5% rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember, 1979. (Zul, 10: 2015)

Implementasi urusan administrasi di Iran ditandai oleh dualisme yang unik. Dimana terdapat struktur birokrasi formal dan hierarkis, seperti di negara – negara modern lainnya, termasuk berbagai tingkat kementerian, lembaga pemerintah dan pasukan administrasi. Pekerjaan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan. Di sisi lain, sistem ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam Syiah dan pengawasan dari lembaga – lembaga keagamaan. Pengaruh ini paling jelas terlihat pada peran Pemimpin Tertinggi (Rahbar), yang tidak hanya menjadi kepala negara tetapi juga otoritas spiritual tertinggi. Keputusan-keputusan strategis dan arah kebijakan makro sering kali memerlukan persetujuan atau sejalan dengan visi Pemimpin Tertinggi. Selain itu, Dewan Konstitusi (Guardian Council) memiliki wewenang untuk memastikan bahwa semua undang – undang dan kebijakan publik konsisten dengan syaria Islam dan konstitusi. Ini berarti bahwa setiap inisiatif administratif, dari level kementerian hingga implementasi di lapangan, harus melewati saringan ideologis dan keagamaan.

Adapun ciri khas system pemerintahan di Iran yang dapat dilihat yaitu, terdapat dominasi Agama, Islam Syiah yang merupakan agama resmi dan mempunyai pengaruh besar dalam semua aspek pemerintahan dan hukum. Konsep "Wilayatul Faqih" (pemerintahan oleh ahli hukum Islam) adalah landasan ideologis sistem ini, di mana Pemimpin Agung memiliki otoritas tertinggi. Lalu terdapat dualitas kekuasaan antara institusi yang dipilih (Presiden, Parlemen) dengan institusi yang ditunjuk oleh Pemimpin Agung (Dewan Penjaga, Ketua Kehakiman), dengan Pemimpin Agung memegang kendali tertinggi. Juga, Meskipun ada pembagian administratif, kekuasaan cenderung sangat tersentralisasi pada Pemimpin Agung dan lembaga lembaga yang berada di bawah kendalinya.

Memang Iran sendiri dalam administrasi pemerintahannya menggunakan prinsip Islam Syi'ah yang kental. Secara keseluruhan, penerapan rezim Islam di Iran adalah model yang tidak jelas. Di sisi lain, ia mewakili upaya sejati untuk membangun sistem pemerintahan yang berakar pada nilai – nilai moral dan spiritual. Sementara itu, dengan tantangan yang melekat dalam integrasi, ia menyoroti ideologi ketat dari kebutuhan praktis administrasi di dunia modern. Aplikasi ini sering dipandang sebagai perjuangan berkelanjutan antara idealisme agama dan realitas birokrasi. Keberhasilan dan kegagalan sistem ini memberikan ajaran yang berharga tentang kompleksitas pemerintah di negara yang berupaya menyelaraskan persyaratan pemerintahan abad ke-21 dengan identitas agama yang kuat. Ini bukan hanya aplikasi teknis, tetapi manifestasi dari ambisi untuk menciptakan tatanan yang adil dan moral dalam masyarakat berdasarkan prinsip – prinsip Islam.

Iran memiliki sistem administrasi formal yang mencakup kementerian dan lembaga pemerintah, mirip dengan negara lain. Namun, sistem ini secara simultan berada di bawah pengawasan ketat dan arahan dari lembaga-lembaga keagamaan, seperti kantor Pemimpin Tertinggi (Rahbar) dan Dewan Konstitusi (Guardian Council). Setiap kebijakan atau inisiatif seringkali harus melewati lapisan persetujuan teknokratis dan ideologis, ini merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi dimana terdapat proses pengambilan keputusan sering kali terlambat karena birokrasi yang Panjang, serta dengan banyaknya lapisan pengawasan dan koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, kurangnya kejelasan wewenang, dan bahkan terkesan membuang – buang sumber daya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan administrasi publik di Iran merupakan sebuah usaha besar yang menghadapi banyak kendala, mulai dari sistem internal yang rumit hingga tekanan dari luar yang besar. Untuk mengatasi masalah – masalah ini, diperlukan perubahan internal yang mendalam dan penataan hubungan di luar negeri agar tujuan administrasi Islam yang adil dan efisien dapat terwujud sepenuhnya.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi administrasi publik di Republik Islam Iran adalah sebuah contoh nyata bagaimana sebuah negara modern berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat ke dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Sejak Revolusi 1979, Iran telah menciptakan sistem yang unik, memadukan struktur birokrasi konvensional dengan pengawasan ideologis-keagamaan yang ketat. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (al – adl), amanah, musyawarah (shura), dan akuntabilitas (hisbah) secara eksplisit menjadi landasan teoretis bagi seluruh kebijakan dan praktik administrasi publik.

Namun, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, pelaksanaan di lapangan memiliki berbagai kompleksitas dan tantangan yang besar. Dualitas antara sistem birokrasi yang modern dengan lembaga – lembaga keagamaan sering menyebabkan ketidakefektifan dan adanya lapisan-lapisan birokrasi yang berlebihan. Masalah korupsi dan praktik nepotisme tetap merupakan rintangan utama, menunjukkan jurang yang ada antara cita – cita Islam dan kenyataan di lapangan. Selain itu, sanksi dari negara lain dan terbatasnya sumber daya semakin mempersulit usaha pemerintah dalam memberikan layanan publik yang terbaik.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Bariyyah, I. K. Studi Komparatif Proses Impeachment Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Iran.
- Karnen, Z. (2015). Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 3(1).
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E. M., & Supit, B. F. (2023). Reformasi administrasi publik.
- Ode, L., Tamar, M., & Murfi, A. (2009). Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 145–154. ISSN 1979-5645.
- Tamar, M., & Murfhi, A. (2009). Pengaruh Agama Dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(2), 145–154.

- Vika Wafa, Imam Ghazali, & Zainal Fanani. (2025). Teodemokrasi dalam Konsepsi Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Abu al-A'la Maududi dan Ayatullah Khomeini). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(1). e-ISSN: 2723-0422.
- Yuliani, T., Iswadi, I., Armizawati, A., Desnawita, D., & Yulinda, D. (2020). Analisis Perkembangan Pendidikan Islam di Iran. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(1), 87–98.
- Zulkarnen, Z. (2017). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 3(1), 1–19.
- Kamal., M., R. (2024). PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PENERAPAN DALAM NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, STAI Darul Ulum Kandungan, Kalimantan Selatan*. E-ISSN 3026-3824.
- Kusuma., A . E. (2021). Kepemimpinan Imam Khomaeni pada Revolusi Iran Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal HIMMAH* 5(1). Program Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saleh., I . N . M. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, IV(1), 1436. PIC Peace Generation Yogyakarta.